

LAPORAN ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) ATAS PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN SEMESTER 1, TAHUN 2021

I. Pendahuluan

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), dituntut untuk terus memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanannya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang BBP Mektan selenggarakan, dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.: 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pertanian No.: 78/Permentan/OT.140/8/2013.

Peraturan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh UKPP lingkup Kementerian Pertanian baik itu keberhasilan ataupun kelemahan atau kekurangan dari unsur-unsur pelayanan yang diberikan. Menggunakan Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian No.: 19/Permentan/OT.080/4/2018 sebagai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka tingkat kepuasan masyarakat dapat diukur yaitu melalui metode penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang datang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan pelayanan BBP Mektan. Pada kuesioner terdapat 9 unsur pelayanan yang akan dinilai oleh para pengguna pelayanan dari eksternal BBP Mektan meliputi : **layanan diseminasi Informasi Teknologi** yang terdiri dari layanan (informasi dan konsultasi, perpustakaan, kunjungan, PKL/magang/bimtek/pelatihan) serta **layanan pengujian alat dan mesin pertanian** sebagai pelanggan.

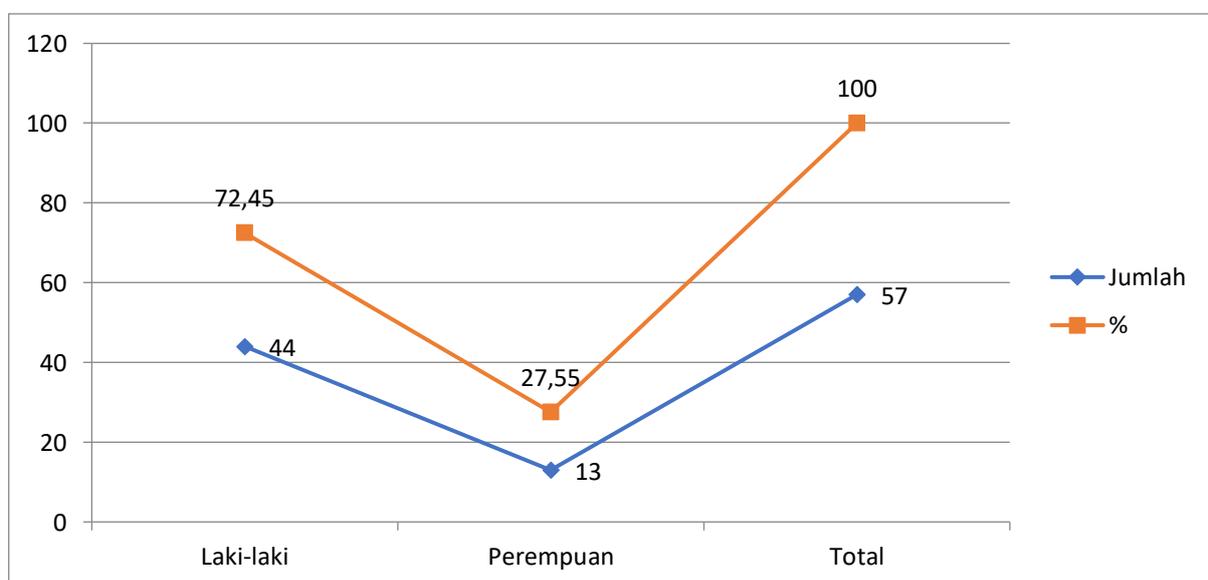
II. Metodologi SKM

Pelaksanaan kegiatan *Survey* SKM BBP Mektan dimulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan terbagi menjadi dua semester pada Tahun 2021. Metode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert* yang terdiri dari 9 unsur layanan. Responden ditetapkan berdasarkan jumlah pengguna layanan yang ada di BBP Mektan. Pengisian kuesioner dan analisis data menggunakan aplikasi layanan SKM online melalui : <http://ikm.pertanian.go.id/?u=H05>

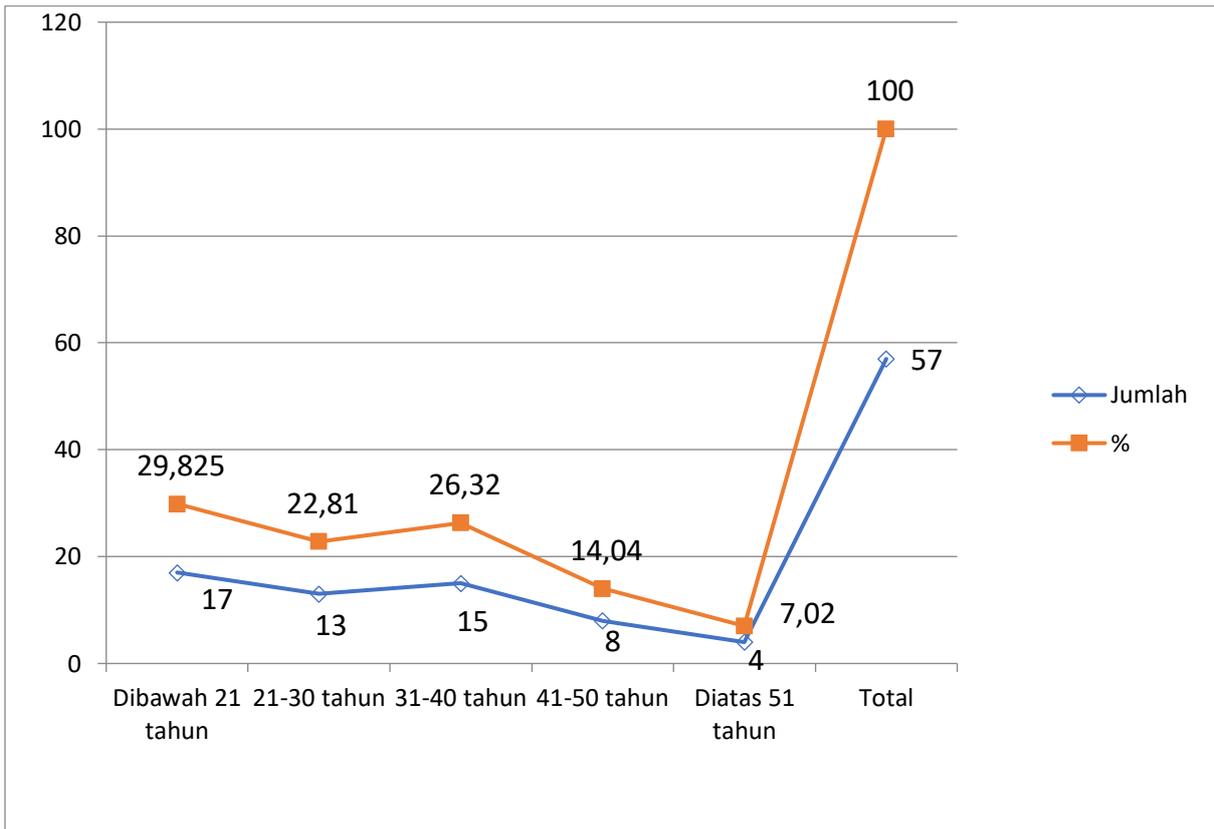
Gambar 1. Tampilan aplikasi layanan Survei Kepuasan Masyarakat online

III. Pengukuran dan Analisis Data SKM

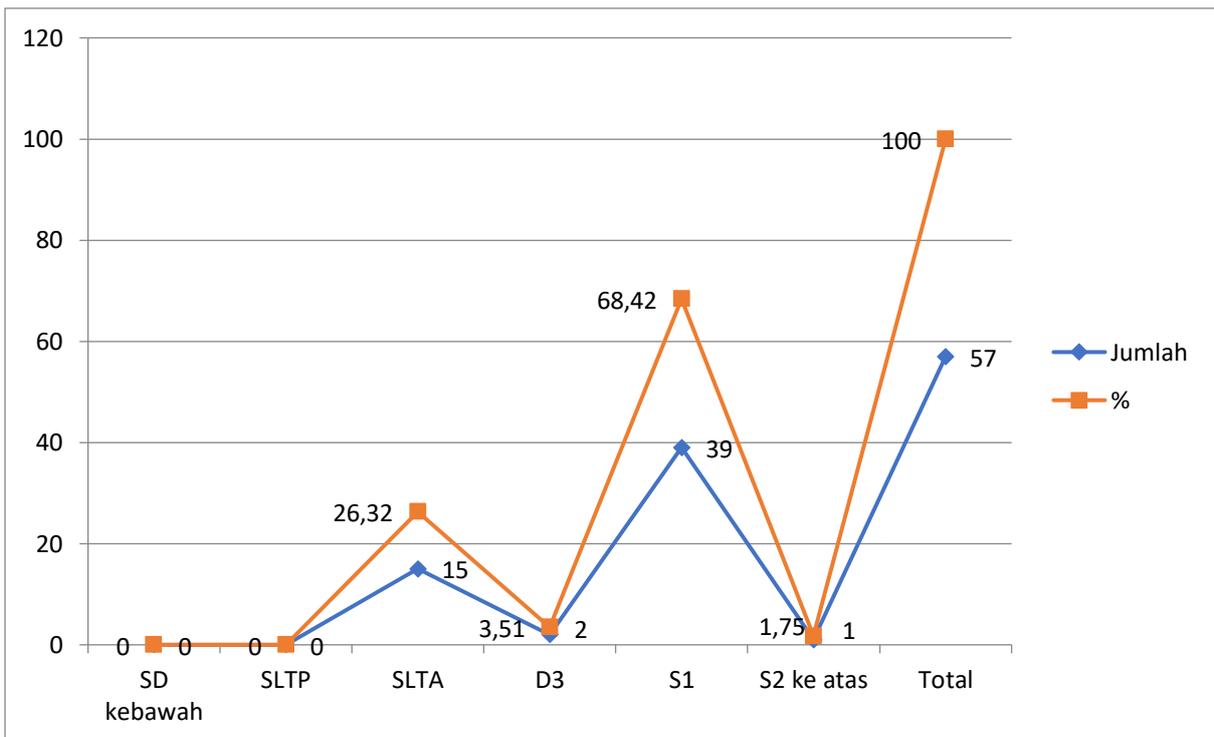
Pengukuran SKM BBP Mektan tahun 2021 dilakukan secara berkala 2 semester, yaitu semester 1 untuk bulan Januari – 14 Juni 2021 sedangkan untuk semester 2 pada bulan Juli – Desember 2021. Jumlah responden pada semester 1 tahun 2021 ini sebanyak 57 responden pengguna layanan lingkup BBP Mektan. Data responden secara lengkap pada Semester 1 tahun 2021 sebagai berikut :



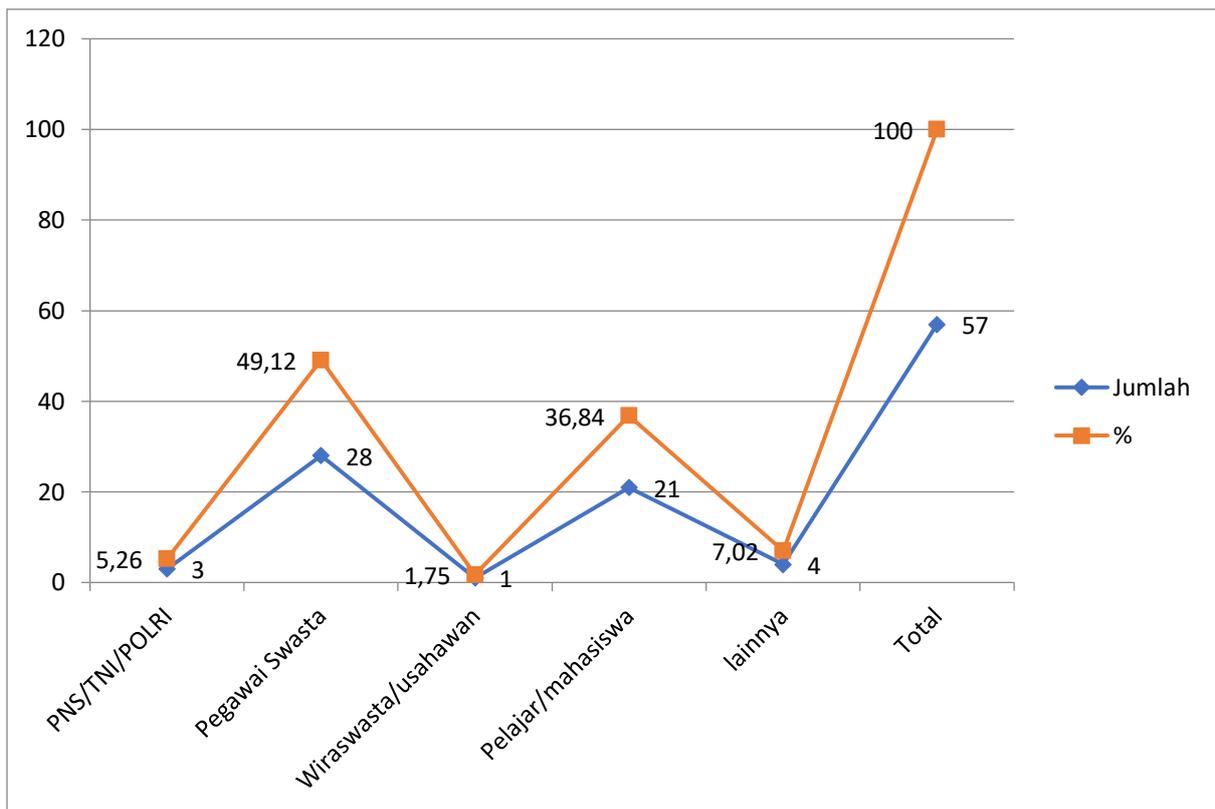
Gambar 2. Data responden berdasarkan jenis kelamin



Gambar 3. Data responden berdasarkan usia

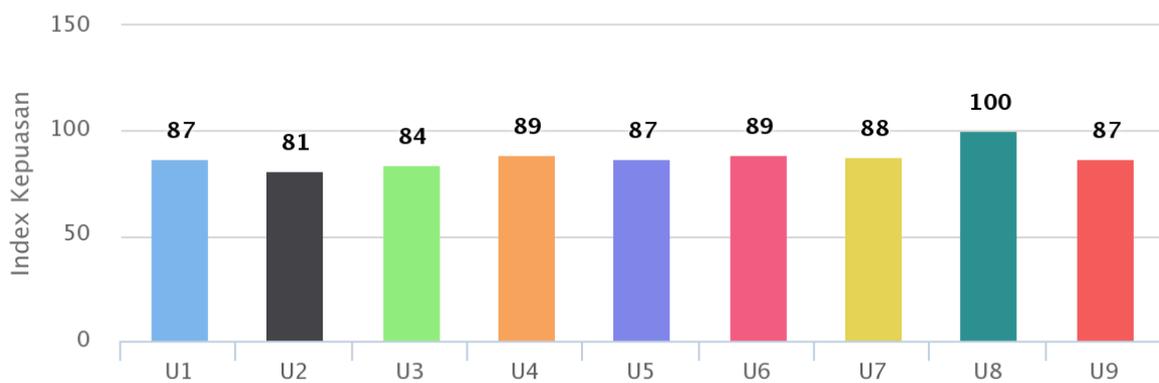


Gambar 4. Data responden berdasarkan pendidikan



Gambar 5. Data responden berdasarkan pekerjaan

Nilai IKM Per Unsur



Grafik 5. Nilai IKM Per Unsur Semester 1, 2021

Hasil analisis perhitungan IKM terhadap kedua layanan (diseminasi dan pengujian alsintan) tersebut untuk semester 1 tahun 2021 dibandingkan analisis perhitungan semester 2 tahun 2020, hasil penilaian terhadap 9 unsur layanan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil pengukuran per unsur layanan semester 2 ,2020 dan semester 1, 2021.

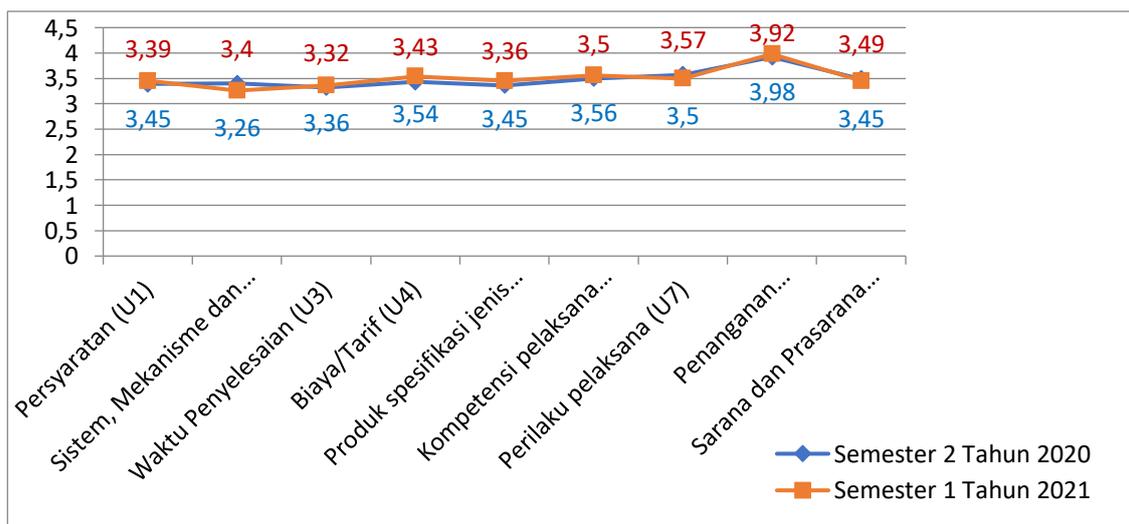
No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur			
		Semester 2 Tahun 2020		Semester 1 Tahun 2021	
1	Persyaratan (U1)	3.39	B	3.45	B
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3.40	B	3.26	B
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.32	B	3.36	B
4	Biaya/Tarif (U4)	3.43	B	3.54	B
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5)	3.36	B	3.45	B
6	Kompetensi pelaksana (U6)	3.50	B	3.56	B
7	Perilaku pelaksana (U7)	3.57	B	3.50	B
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)	3.92	A	3.98	A
9	Sarana dan Prasarana (U9)	3.49	B	3.45	B
Nilai Indeks		3.49		3.51	
Nilai Konversi		87.26		87.75	
Mutu Pelayanan		B		B	

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa mutu pelayanan di BBP Mektan mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil pengukuran IKM pada semester 2 tahun 2020, yaitu dari 87.26 menjadi 87.75 dalam kategori baik, walaupun beberapa unsur layanan mengalami penurunan nilai.

Nilai mutu pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.: 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri PANRB No.14 tahun 2017 sebagai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Mutu Pelayanan

No	Nilai Interval Konversi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kienerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,533 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik



Gambar 6. Grafik perbandingan nilai IKM BBP Mektan Semester 2, 2020 dan Semester 1, 2021

Berdasarkan hasil analisis IKM, maka akan dilakukan evaluasi terhadap unsur layanan yang mengalami penurunan. Nilai yang mengalami penurunan pada Semester 1 tahun 2021 dibandingkan semester 2 tahun 2020 ini adalah pada unsur **Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U9)**. Sedangkan 6 unsur layanan lainnya telah mengalami kenaikan sehingga perlu dipertahankan dan tetap harus ditingkatkan lagi.

Unsur layanan terendah pada semester 1 tahun 2021 ada pada unsur **Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)** dan unsur layanan tertinggi pada unsur **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)**.

Berdasarkan analisis internal BBP Mektan maka penyebab penurunan 3 unsur nilai pada **Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U9)**, adalah dikarenakan : a) Ada pengguna layanan baru yang belum mengetahui tentang sistem, mekanisme dan prosedur layanan yang ada; b) Pada saat Pandemi Covid-19 ini ada rasa ketakutan petugas layanan untuk melakukan kegiatan layanan di luar kantor dan berinteraksi secara langsung dengan orang luar sehingga berpengaruh terhadap perilaku pada petugas layanan; c) Sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya Tindak Lanjut yang akan dilakukan

Tindak lanjut dari hasil SKM tersebut, maka perlu segera dievaluasi untuk memperbaiki mutu pelayanan khususnya terhadap nilai pelayanan terendah dan yang mengalami penurunan. Untuk peningkatan mutu pelayanan akan diambil langkah-langkah, meliputi :

- a. Secara terus menerus mensosialisasikan tentang sistem, mekanisme dan prosedur layanan yang ada di BBP Mektan melalui berbagai media, serta memberikan penjelasan terutama kepada setiap pengguna layanan baru, bagaimana cara mengakses semua informasi yang mereka butuhkan
- b. Secara terus menerus mensosialisasikan tentang budaya pelayanan prima pada setiap kegiatan internal balai serta meningkatkan kapasitas petugas layanan dengan berbagai pelatihan/ workshop/ bimtek sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- c. Untuk mengatasi yg pelayanan kurang karena ketakutan covid mgkn perlu ditambahkan mengenai penambahan fasilitas untuk proses seperti untuk desinfektan dan adanya persyaratan hasil antigen negatif
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana lebih optimal dan melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia

Penutup

Pengukuran IKM yang telah berjalan baik ini merupakan peran aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik (feedback) kepada BBP Mektan dan dapat dijadikan sebagai bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi nantinya. Selain itu, diharapkan dapat tercapai sasaran Indeks kepuasan masyarakat yang meliputi : Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, demikian juga dengan sarana dan prasaranan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; serta tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.